

ABSTRAK

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah sampai sekarang yaitu melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 April 2010. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di Indonesia menggunakan sistem faktur. Dengan sistem ini, maka pada setiap transaksi yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan keabsahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditandai dengan penerbitan faktur pajak.

Faktur Pajak hanya dapat dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan / Jasa Kena Pajak (JKP). Tanpa adanya faktur pajak, maka penjual dapat dianggap belum melaksanakan tugasnya untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran). dan di sisi lain pembeli dapat dianggap belum membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi sangat jelas betapa pentingnya arti selembat faktur pajak baik bagi penjual maupun pembeli.

Penelitian ini menggunakan metode penggunaan angka acak dalam pemilihan sampel dan dalam menguji hipotesisnya menggunakan statistik parametrik dengan uji t berpasangan. Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 yang berarti faktur pajak berperan penting dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pajak Keluaran, Uji t Berpasangan.

ABSTRACT

Collection of Value Added Tax (VAT) is based on the law No. 8 / 1983 on Value Added Tax and Goods and Services Sales Tax on Luxury Goods until now that is with the implementation of Law No. 42/ 2009 which entered into force effective on April 1, 2010 . Collection of Value Added Tax (VAT) and sales tax on luxury goods in Indonesia using the invoice system. With this system, then on every transaction that the object of Value Added Tax on Goods and Services and the validity of the collection of Value Added Tax (VAT) is marked by the issuance of tax invoices.

Tax Invoice can only be made by the Taxable who perform the delivery of Taxable Goods and / Taxable Services .Without a tax invoice, the seller can be thought of not performing their duties to collect Value Added Tax (Tax Output). and on the other hand can be considered the buyer has not paid Value Added Tax (VAT). So very clearly how important the meaning of a piece of the tax invoice for both sellers and buyers.

This research method using random numbers table in the sample selection and hypothesis testing using parametric statistics with paired t test. After testing the the results obtained sig (2-tailed) less than 0.05 which means the tax invoice was instrumental in the collection of Value Added Tax.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Tax Invoice, the Taxable, Tax Output, Paired t Test .

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	11

2.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.1.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23
2.1.4 Barang dan Jasa yang tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	33
2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai	39
2.1.6 Tarif dan Penghitungan PPN	42
2.1.7 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	43
2.1.8 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	46
2.1.9 Pengertian Faktur Pajak	46
2.1.10 Penjelasan Faktur Pajak	47
2.1.11 Dokumen-dokumen yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak	50
2.1.12 Faktur Pajak Gabungan	53
2.1.13 Saat Pembuatan Faktur Pajak	53
2.2 Kerangka Pemikiran	54
2.3 Hipotesis.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	60
3.1.1 Sejarah Singkat PT X	60
3.1.2 Struktur Organisasi	62
3.2 Operasional Variabel	63
3.3 Metode Penelitian	65
3.3.1.1 Populasi	67

3.2.1.2 Sampel	67
3.4. Pemilihan Sampel	68
3.4.1 Pengujian Hipotesis	72
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Penggunaan Faktur Pajak	78
4.2 Peranan Faktur Pajak Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	81
4.3 Pengujian Analisis	85
4.3.1 Hasil Pengujian Analisis	98
 Bab V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Divisi Finance di PT. X.....	60
Gambar 3.2 Alur Penggunaan Aplikasi Teknik Sampling untuk Pajak Keluaran.....	71
Gambar 4.1 Sistem dan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	64
Tabel 3.2 Tabel Angka Sampel.....	69
Tabel 4.1 Jumlah Populasi dan Sampel	85
Tabel 4.2 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Januari 2009	86
Tabel 4.3 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Februari 2009	87
Tabel 4.4 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Maret 2009	88
Tabel 4.5 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya April 2009	89
Tabel 4.6 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Mei 2009	90
Tabel 4.7 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Juni 2009	91
Tabel 4.8 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Juli 2009	92
Tabel 4.9 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Agustus 2009.....	93
Tabel 4.10 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya September 2009	94
Tabel 4.11 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Oktober 2009	95
Tabel 4.12 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya November 2009.....	96
Tabel 4.13 Sampel Faktur Pajak dan Nominalnya Desember 2009.....	97
Tabel 4.14 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Januari 2009.....	98
Tabel 4.15 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Februari 2009.....	98
Tabel 4.16 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Maret 2009.....	99
Tabel 4.17 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan April 2009	99
Tabel 4.18 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Mei 2009.....	100
Tabel 4.19 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Juni 2009.....	100
Tabel 4.20 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Juli 2009.....	101

Tabel 4.21 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Agustus 2009	101
Tabel 4.22 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan September 2009	102
Tabel 4.23 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Oktober 2009	103
Tabel 4.24 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan November 2009.....	103
Tabel 4.25 Hasil Uji t Paired Samples Test bulan Desember 2009	104

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Faktur Pajak yang Digunakan PT X.....	108
Lampiran I B Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	109
Lampiran II Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak	111
Lampiran III Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	114
Lampiran IVA Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Format Surat Pemberitahuan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak	119
Lampiran IVB Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Format Surat Pemberitahuan Penambahan/ Pengurangan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak.....	120
Lampiran V Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Format Surat Pemberitahuan Menerbitkan Faktur Pajak.....	121
Lampiran VIA Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Format Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/Kuasa yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak.....	122
Lampiran VIB Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Format Surat Pemberitahuan Perubahan Penunjukan Pejabat/Kuasa yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak.....	123
Lampiran VII Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010	
Format Surat Kuasa Khusus Penunjukan Kuasa untuk Menandatangani Faktur Pajak oleh PKP Orang Pribadi yang Tidak Memiliki Struktur	

Organisasi dan Tidak Menandatangani Sendiri Faktur Pajaknya	124
Lampiran VII Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-13/Pj./2010.....	125